

DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK

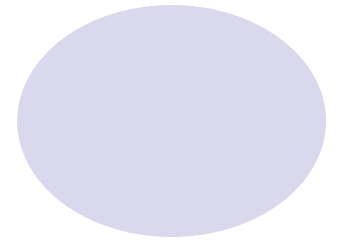
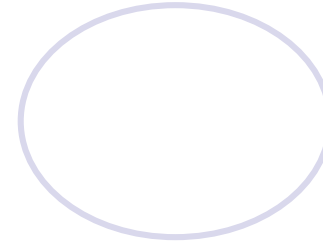
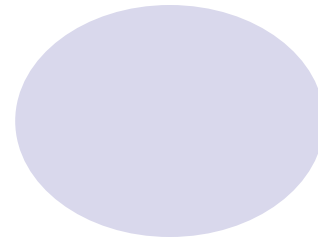
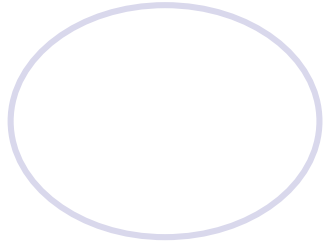
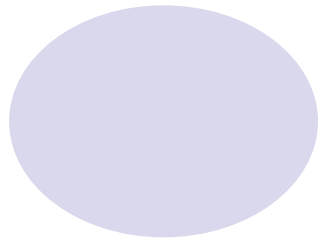
(Lanjutan)

Ir.DEDDY S. BRATAKUSUMAH, BE, MURP. MSc, PhD

E-mail: deddys@bappenas.go.id

MOBILE/SMS: 0816 968367

2018



LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK

TEORI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN

No	Teori Pemerintahan	Pencetus Kebijakan
1	Pluralism	They Emerge from Popular Demands
2	Various Environmental and Evolutionary Theories	General Forces External to the Political System Force Them on to the Agenda (e.g. Demographic, Economic, Environmental Issues)
3	Theories which Stress the Power of the State Itself and Seek to Analyze the Roles of Actors within the Institutions of Government	People within the System (the Government, in its widest sense) Identify Needs or Problems which Need Solving

SISTEM KEBIJAKAN



Policy System: The overall institutional pattern within which policies are made.

The three elements of public policy system are: Public Policies, Policy Stakeholders, and Policy Environments.

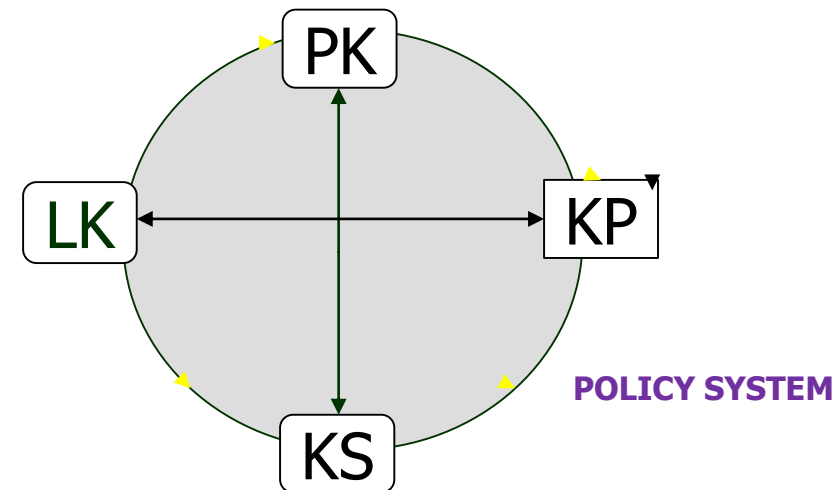
(DUNN dan DYE, pada Mustopadidjaja, 2011)

SISTEM KEBIJAKAN

SISTEM KEBIJAKAN PADA DASARNYA ADALAH SUATU KESATUAN KELEMBAGAAN YANG BERPERAN MEWADAHAI DAN MELANGSUNGKAN PROSES KEBIJAKAN, DAN TERDIRI DARI EMPAT UNSUR POKOK, YAITU ; LINGKUNGAN KEBIJAKAN, PROSES PENGELOLAAN (PEMBUATAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN), KEBIJAKAN ITU SENDIRI, DAN KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN, DI MANA BERPERAN BERBAGAI STAKEHOLDERS.

TATANAN KELEMBAGAAN YANG BERPERAN ATAU MERUPAKAN “WAHANA” DALAM PENYELENGGARAAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN “PROSES KEBIJAKAN” (FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN) YANG MENGAKOMODASIKAN KEGIATAN TEHNIS (TECHNICAL PROCESS) MAUPUN SOSIOPOLITIS (SOCIOPOLITICAL PROCESS) SERTA SALING HUBUNGAN ATAU INTERAKSI ANTAR 4 EMPAT UNSUR DINAMIK:

- LK = LINGKUNGAN KEBIJAKAN
- PK = PENGELOLA KEBIJAKAN
- KP = KEBIJAKAN ITU SENDIRI
- KS = KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN



(Mustopadidjaja AR, 2011)

LINGKUNGAN KEBIJAKAN



Menurut Ilmu Sistem, pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat kebijakan itu dibuat dan diterapkan.

Kebutuhan akan suatu kebijakan muncul dari tuntutan lingkungannya, yang disampaikan melalui sistem politik yang berlaku

Namun demikian, lingkungan pun memiliki pembatasan dan penghambat yang harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan.

(ANDERSON, 1984)

LINGKUNGAN KEBIJAKAN



Lingkungan kebijakan meliputi:

1. Budaya Politik

Misalnya ada tiga budaya politik yang bisa dikenali:

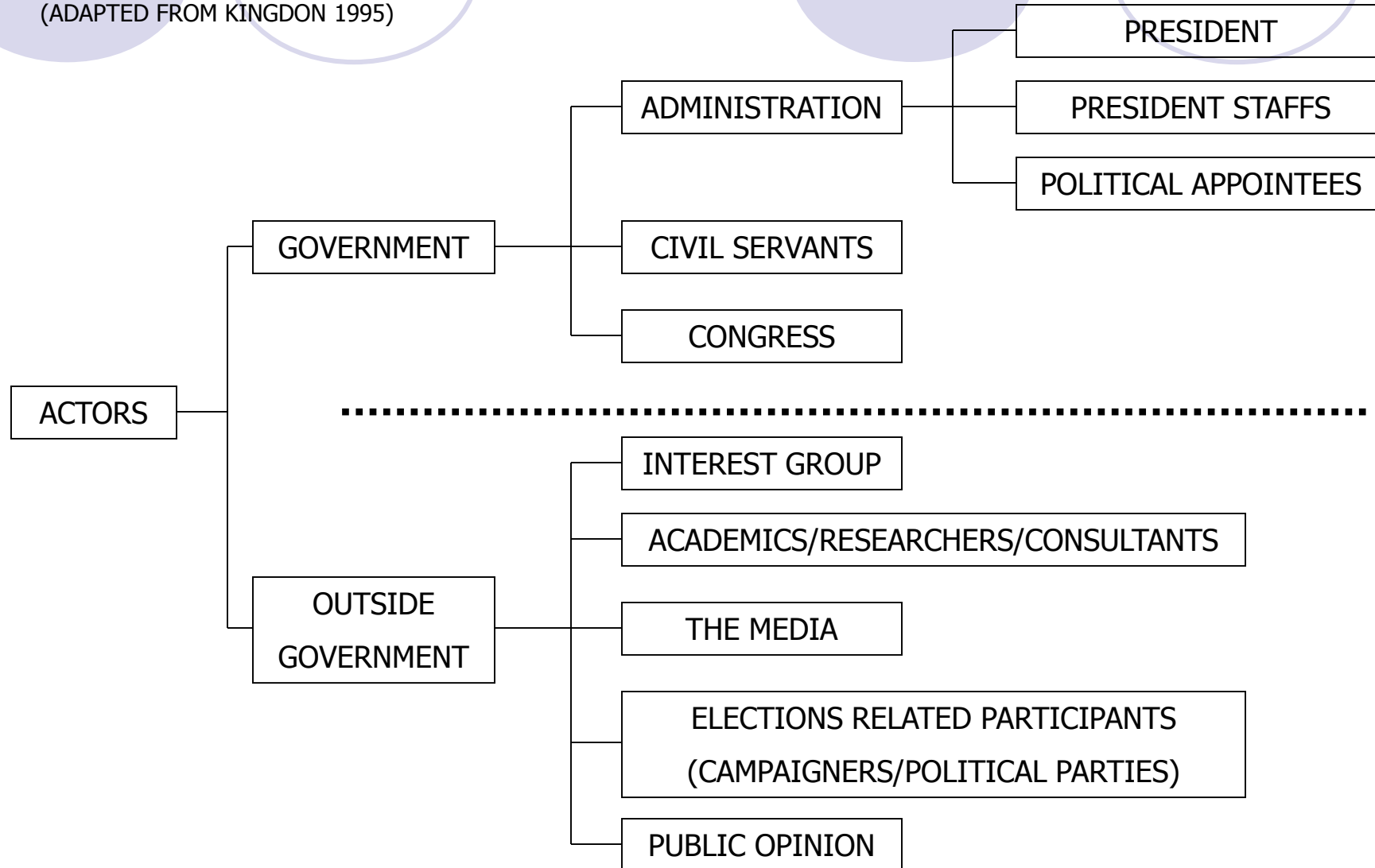
- moralistik
- individualistik
- tradisionalistik

2. Kondisi Sosial Ekonomi

(ANDERSON, 1984)

PUBLIC POLICY MAKING ACTORS

(ADAPTED FROM KINGDON 1995)



PARA AKTOR PEMBUAT KEBIJAKAN



Para Pembuat Kebijakan akan dapat dikategorikan berasal dari:

1. Dalam Pemerintahan
2. Luar Pemerintahan, tetapi yang bukan hanya sebagai pengamat

(KINGDON, 1995)

DARI DALAM PEMERINTAHAN

1. EKSEKUTIF (*ADMINISTRATION*)

Terdiri dari:

- a. Presiden
- b. Staf Khusus Presiden
- c. Para pejabat politik, yang diangkat oleh presiden (Menteri, atau para Kepala Lembaga Negara)

Di USA rancangan kebijakan dari Presiden menjadi prioritas pembahasan di Kongres



DARI DALAM PEMERINTAHAN

2. PEGAWAI NEGERI SIPIL (*CIVIL SERVANTS*)

Para pegawai negeri sipil pada dasarnya memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam menjalankan pemerintahan, atau memecahkan masalah yang menyangkut pemerintahan dan pelayanan publik.

Karenanya di USA, mereka dapat menyampaikan pendapat tentang isyu yang harus dibuatkan kebijakannya



DARI DALAM PEMERINTAHAN

3. KONGRES (*SENATORS AND MEMBERS*)

Merupakan elemen sentral dari pembuatan kebijakan yang terkait dengan undang-undang. Termasuk di dalam elemen ini adalah para staf dan staf ahli yang bekerja untuk para anggota Kongres.

Bahkan di USA para staf Kongres ini merupakan elemen yang sesungguhnya paling penting, mengingat sebagian besar pekerjaan atau tugas anggota Kongres dikerjakan oleh para staf.

DARI LUAR PEMERINTAHAN



1. KELOMPOK KEPENTINGAN (*INTEREST GROUP*)

Bagaimanapun kelompok kepentingan ini sangat mempengaruhi agenda bahkan substansi kebijakan. Masyarakat bahkan menilai kelompok kepentingan ini bisa mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan.

Kelompok kepentingan yang sering berperan dalam penentuan agenda dan proses pembuatan kebijakan berasal dari kalangan bisnis dan industriawan, lainnya adalah kelompok buruh dan kelompok peduli kesehatan dan minoritas.

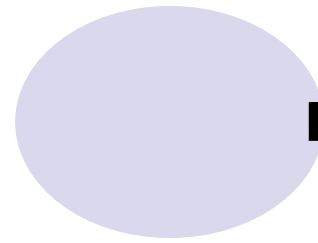
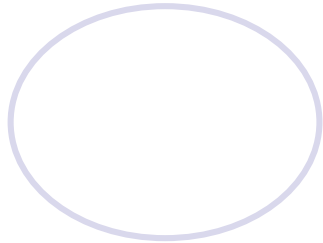
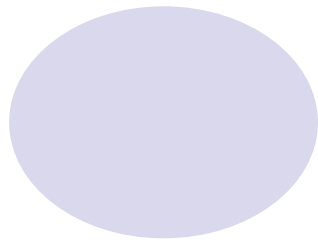


DARI LUAR PEMERINTAHAN

2. AKADEMISI, PENELITI DAN KONSULTAN (*ACADEMICS, RESEARCHERS, AND CONSULTANTS*)

Hasil-hasil kajian atau bahkan percobaan dari para akademisi dan peneliti merupakan isu yang menjadi bahan bagi agenda pembuatan kebijakan.

Demikian pula hasil kerja para konsultan yang disewa oleh eksekutif atau anggota Kongres juga merupakan bahan yang tidak kalah pentingnya untuk membuat alternatif dari suatu kebijakan.



DARI LUAR PEMERINTAHAN



3. MEDIA (*THE MEDIA*)

Saat ini media dapat diartikan sebagai elemen yang sangat berpengaruh didalam memunculkan isyu yang dapat dijadikan agenda bagi pembuatan kebijakan.

Media sangat berperan dalam membuat opini masyarakat terhadap suatu isyu atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat.



DARI LUAR PEMERINTAHAN

4. TIM SUKSES PADA PEMILU (*ELECTION-RELATED PARTICIPANTS*)

Tim sukses pada pemilu umumnya terdiri dari para juru kampanye dan anggota partai politik. Mereka telah menyiapkan materi, jadwal bahkan logistik untuk masa kampanye sampai dengan perhitungan suara.

Merekapun tidak ingin jerih payahnya, apalagi janji-janji politiknya tidak masuk di dalam agenda pembuatan kebijakan



DARI LUAR PEMERINTAHAN

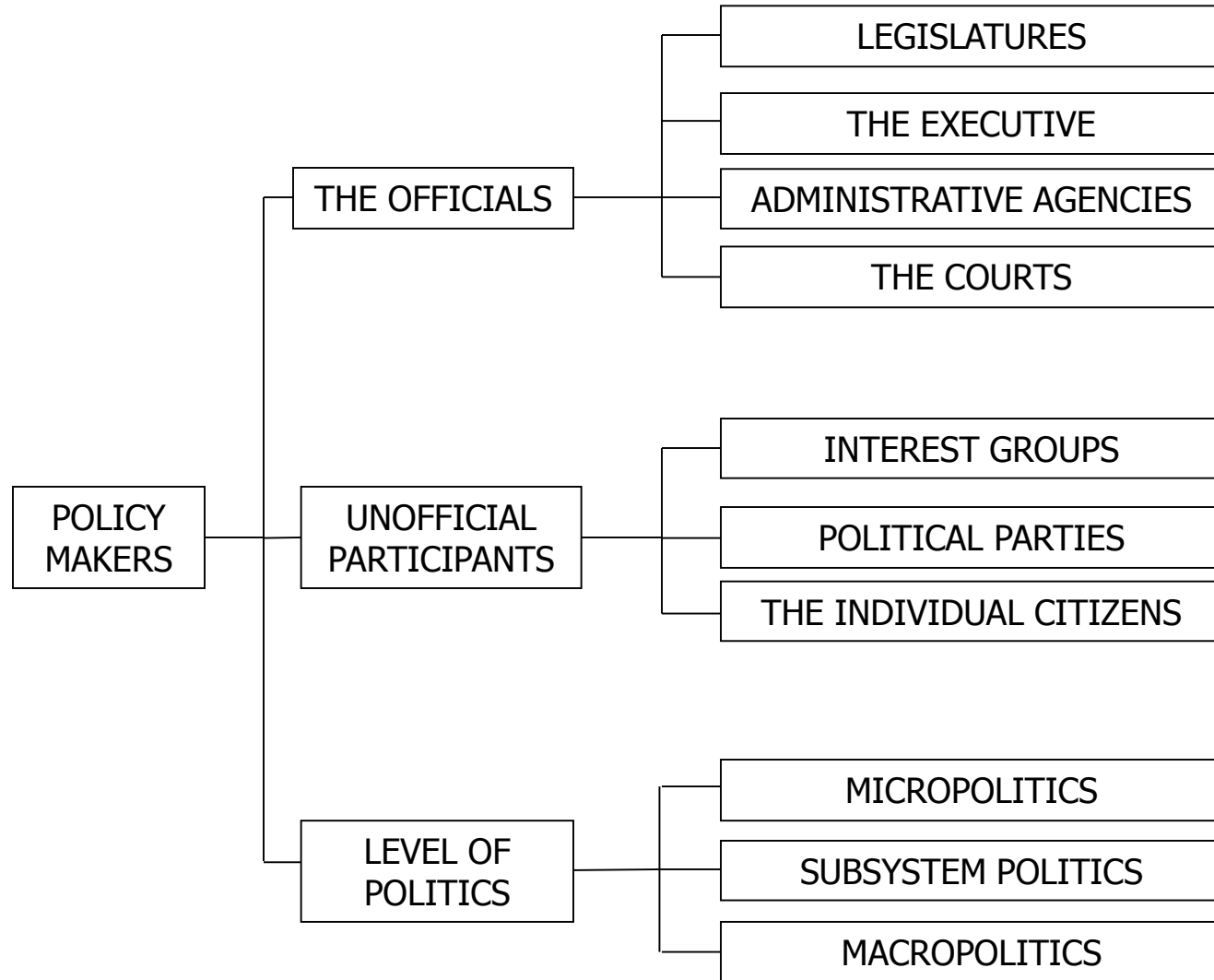
5. OPINI MASYARAKAT (*PUBLIC OPINION*)

Pemikiran-pemikiran atau gagasan yang muncul dari para penyelenggara pemerintahan belum tentu sama dengan opini atau pendapat yang ada atau muncul pada masyarakat.

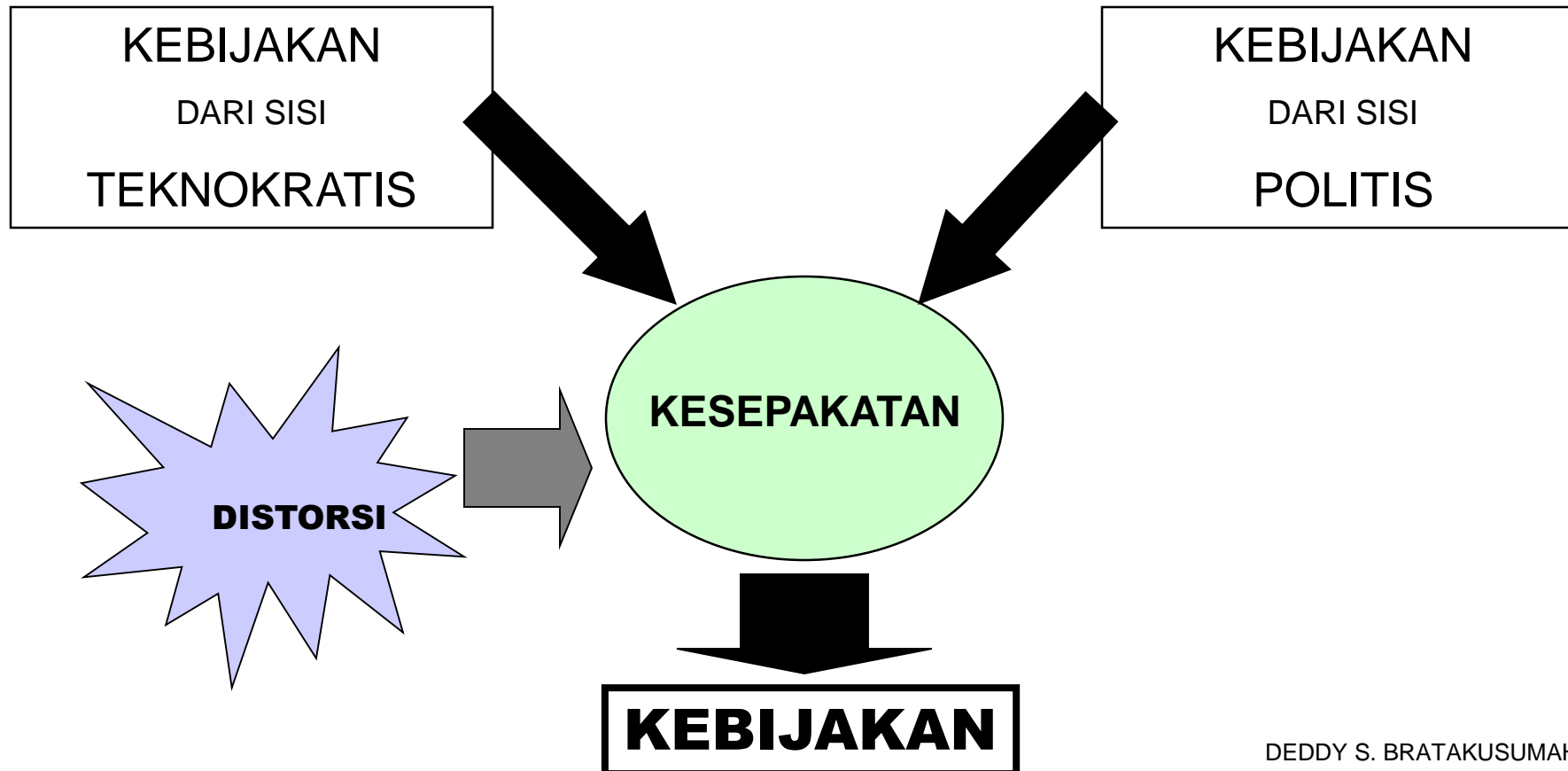
Karenanya pendapat masyarakat juga merupakan elemen yang penting dalam menentukan agenda pembuatan kebijakan.

POLICY MAKERS

(ADAPTED FROM ANDERSON, 1984)



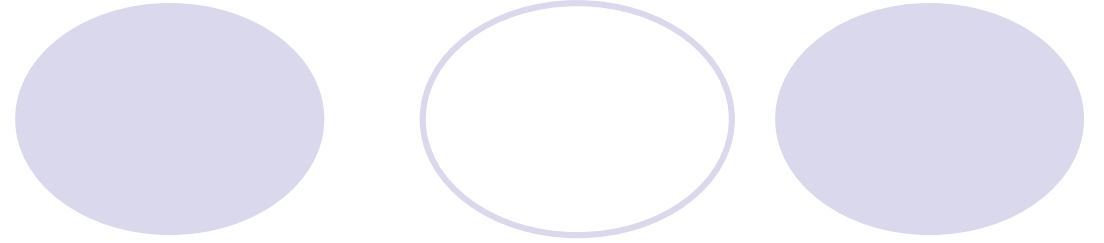
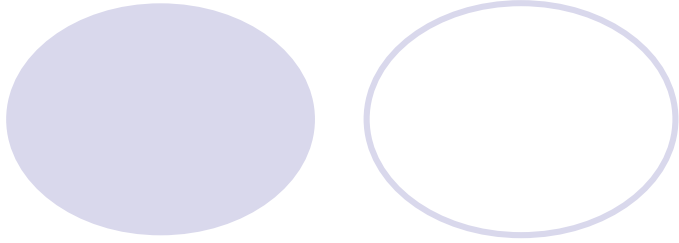
KESEPAKATAN UNTUK KEPUTUSAN





KEBIJAKAN YANG BAIK

1. SEGI EKONOMI, PALING EFISIEN
2. SEGI POLITIS, PALING BISA DITERIMA
3. SEGI ADMINISTRASI, PALING BISA DILAKSANAKAN
4. SEGI ETIS FILOSOFIS, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA



Terima Kasih